



**Pemerintah Provinsi Lampung**

**Rencana Kerja Tahunan  
Tahun Anggaran 2019**



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**  
*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124  
Bandar Lampung*

Web : [koperasiukm.lampungprov.go.id](http://koperasiukm.lampungprov.go.id)

E-Mail : [perencanaankoperasi15@gmail.com](mailto:perencanaankoperasi15@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH TA'ALLA yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 11 (*Sebelas*) program dan 44 (*Empat Puluh Empat*) kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 6.915.858.000,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2019

KEPALA DINAS,



**Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591001 198708 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 6.915.858.000,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), mencakup 44 (*Empat Puluh Empat*) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 316.418.979,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 466.930.000,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 25.740.000,-
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 5.000.000,-
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 19.080.000,-
7. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 24.935.000,-
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 80.000.000,-
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
10. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 70.000.000,-
11. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 7.752.000,-
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 33.615.612,-
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 160.084.000,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 18.875.000,-
15. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 115.330.000,-
16. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 7.031.036,-
17. Penyusunan Renstra, dengan biaya Rp. 9.942.679,-
18. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 41.642.000,-

19. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 25.599.974,-
20. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
21. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 81.002.874,-
22. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM, dengan biaya Rp. 123.982.500,-
23. Sosialisasi KUMK 15 kab/kota, dengan biaya Rp. 141.288.000,-
24. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan biaya Rp. 300.000.000,-
25. Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 75.851.200
26. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 72.239.784,-
27. Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan, dengan biaya Rp. 22.752.750,-
28. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
29. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan, dengan biaya Rp. 46.814.556,-
30. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya Rp. 44.033.320,-
31. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 547.052.000,-
32. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 37.022.126,-
33. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 63.105.200,-
34. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, dengan biaya Rp. 34.072.880,-
35. Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita, dengan biaya Rp. 95.000.000,-
36. Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan, dengan biaya Rp. 29.873.796,-
37. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.921.420.000,-
38. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya Rp. 156.728.135,-

39. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 102.318.500,-
40. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
41. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 16.068.316,-
42. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 39.121.795,-
43. Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
44. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 60.133.988,-

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal	i
HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Dasar Hukum	I – 2
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	I – 4
	1.4. Susunan Organisasi	I – 6
	1.5. Maksud dan Tujuan	I – 9
BAB II	RENCANA STRATEGIS	
	2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019	... II – 1
	2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu	... II – 4
	2.3. Rencana Kerja Tahun 2019	II – 5
	2.4. Matriks RKT Tahun 2019	II – 17
BAB III	PENUTUP	... III – 1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah Perindustrian dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung bergabung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

## 1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. memfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4. Susunan Organisasi

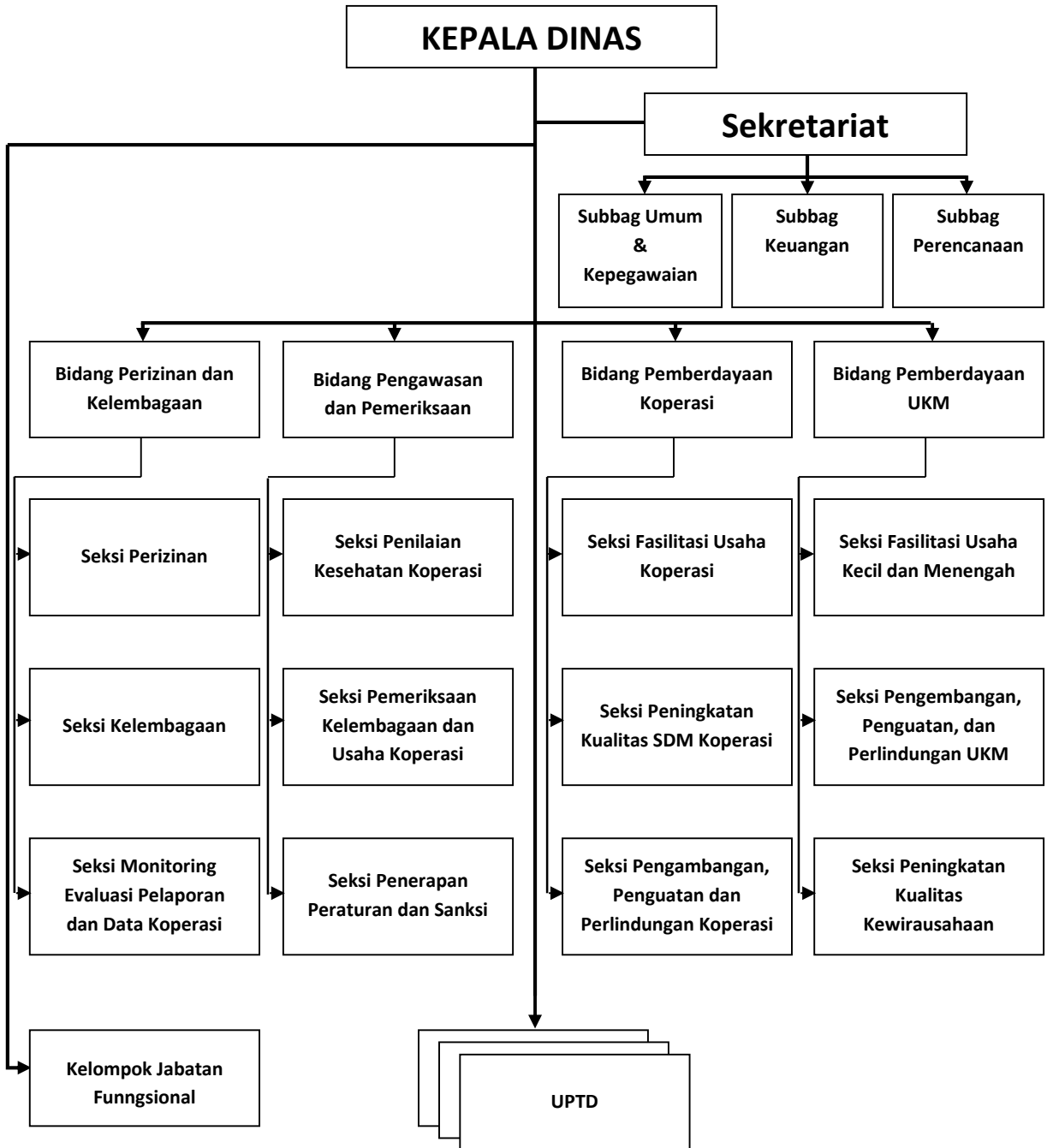
- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
    1. Seksi Perizinan;
    2. Seksi Kelembagaan dan;
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
    1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
    2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
    3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
    1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
    2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
    3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
  - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
    1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung  
Nomor : 8 Tahun 2016  
Tanggal : 21 Nopember 2016



## 1.5. Maksud dan Tujuan

### 1.5.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah merupakan sebagai tindaklanjut / break down dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2019 (desentralisasi) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan rencana Pembangunan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam dokumen RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2019.

### 1.5.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana Strategis yaitu Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Program pembangunan selama lima tahun mendatang (2015 sampai dengan 2019) terdiri atas 13 (tiga belas) program pembangunan sebagaimana yang terinci yaitu:

1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya
2. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD
3. Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat usahanya
4. Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang berkembang kelembagaannya
5. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya



6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Revitalisasi Kelembagaan dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya
7. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur
10. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program adalah jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin aparat.
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan
13. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

## 2.2. Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyongsong masa pembangunan lima tahun ke depan memiliki tekad untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, sumbu dan poros. Selain sebagai strategi untuk melangkah ke depan, energy masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Provinsi Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan daerah. Visi menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan pada periode 2015-2019.

Secara eksplisit Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

### **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”**

Visi pembangunan Provinsi Lampung tersebut memiliki berbagai dimensi di antaranya: “Maju” memiliki konotasi modernisasi atau industrialisasi, dan mantap berorientasi ke masa depan. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum)

Perekonomian yang maju merupakan suatu tahapan dalam perubahan structural ekonomi yaitu terjadinya perubahan secara gradual struktur perkonomian yang semula berbasis kepada sektor primer (pertanian) berubah menjadi sektor yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa,

didukung oleh infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan berskala tinggi. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang tepat. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat pendidikan terendah, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah tenaga ahli atau professional yang dihasilkan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki system dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan yang demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas menyatakan pendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib serta menghargai profesi.

Kemajuan suatu bangsa seperti diuraikan dalam visi pembangunan nasional juga diukur berdasarkan indicator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Dimensi lain dari Lampung Provinsi yang maju di antara Provinsi di Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Makna yang lebih mendalam adalah Lampung sebagai bagian dari Bangsa Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya modal dan teknologi buatan manusia sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan.

Menjadi wilayah maju bagi Provinsi Lampung, juga memiliki makna bahwa Lampung memiliki kinerja ekonomi tinggi. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur antara lain pendapatan per kapita penduduk Lampung lebih baik dari rata-rata nasional. Yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran, desa tertinggal semakin berkurang dan bertambah maju.

Upaya untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang tersisa dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, penciptaan lapangan usaha yang kondusif untuk investasi, peningkatan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*entrepreneurship government*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, yang ditunjang dengan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Dimensi sejahtera memiliki makna sejahtera dalam bidang ekonomi dengan pembagian yang lebih adil dan merata, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan social, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemajuan, selain ditandai oleh kemakmuran, juga ditandai oleh kemandirian. Secara politik, kemandirian pada hakekatnya merupakan bagian dari kemerdekaan, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian mengenal adanya

kondisi saling ketergantungan, baik dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensive, melainkan konsep dinamis karena menyadari bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian juga memiliki makna adanya kemampuan membangun kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders dan daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemandirian dalam perspektif otonomi daerah adalah kondisi dimana derajat otonomi daerah Provinsi Lampung menjadi tinggi yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dari segi keuangan, kemandirian menunjukkan bahwa ketergantungan kepada dana pusat semakin menurun sebaliknya pendapatan asli daerah semakin meningkat untuk didayagunakan dalam proses pembangunan.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan di segala aspek pembangunan yang berdaya saing untuk mencapai kemandirian.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019, telah dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.
4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi, dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

#### 2.2.1. Visi dan Misi OPD

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dengan besaran dan dimensi waktu yang ditentukan. Visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun mendatang baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus disinergikan untuk pencapaian visi daerah.

Visi OPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM mengakomodasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, dan Visi yang telah ini diharapkan akan menjadi acuan bagi OPD dan pihak lain yang terkait dalam rangka membangun Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung terhadap kontribusi

pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah: **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”**. Penjabaran Visi ini jika dikaitkan dengan pembanguan Bidang Koperasi dan UKM adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat, mengembangkan produk unggulan dan berdaya saing, menumbuhkan wirausaha baru dan kesempatan kerja, mewujudkan SDM pengelola koperasi yang kompeten dan mewujudkan aparatur yang professional, berdedikasi dan tanggap terhadap pelayanan. Koperasi dan UKM yang maju umumnya akan menjadi basis yang kuat untuk berkembangnya sistem perekonomian yang berkelanjutan. Dukungan Sarana dan Prasarana Koperasi yang modern perlu dipersiapkan selain adanya kebijakan-kebijakan terkait koperasi dan UKM melalui kinerja UPTD Perkuatan permodalan, UPTD Badiklatkop dan UKM dan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUKM) yang efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melaksanakan Misi 1 Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu:

**“Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”**

Misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan cara merangsang dan memperkut tumbuhnya gairah investasi di berbagai sector dan ekonomi yang

berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan agar proses menetes ke bawah (*trickle down effect*) berlangsung cepat dan berkesinambungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan yaitu hasil pengelolaan sumber daya yang didukung dengan kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan social yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam pelaksanaan Visi Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunannya selama 5 tahun dengan berupaya Mewujudkan Lampung Sebagai Provinsi Koperasi yang didukung oleh Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Yang Sehat dan Kuat. Upaya tersebut secara terminologi dijelaskan sesuai dengan penjelasan berikut.

**Sehat : Dalam arti kinerja usaha, prinsip – prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya.** Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang berpola syariah harus mematuhi



pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP dan 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS).

**Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat**, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

**Kuat : Dalam arti partisipasi anggotanya.** Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

**Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota.** Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran – ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

Penjabaran dari misi satu tersebut di atas serta untuk mewujudkan pembangunan Koperasi dan UKM yang sehat dan kuat, maka kemudian disusun beberapa sub misi terkait pembangunan Bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung dengan memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan

jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;
- c. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera demokratis dan keadilan

#### 2.2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Lampung
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

Dan sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi
2. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri
3. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM
4. Nilai evaluasi AKIP Dinas

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	100 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru	100 %
		Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	2. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	2. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	100 %

2.3. Matrik Renstra 2015 – 2019 (terlampir)

## 2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan IKU ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah untuk memperoleh:

1. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing IKU yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berasal dari capaian kinerja pada masing-masing IKU. Selama tahun 2018, dari 3 (*tiga*) indikator IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tergambar perbandingannya dengan realisasi kinerja tertuang dalam Matriks dibawah ini :

### 2.2.1. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2018	REALISASI	Tingkat Capaian (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1. Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	78 %	81,83 %	104,91 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru	77 %	79,69 %	109,49 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2018	REALISASI	Tingkat Capaian (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	75 %	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah cukup baik dimana dari ke tiga indikator sudah cukup memenuhi harapan dimana persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif yang ditargetkan naik sebesar 78 persen tercapai sebesar 81,83 persen, persentase pertumbuhan wirausaha baru dari target 77 persen telah tercapai sebesar 79,69 persen dan Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten dari target 75 persen telah tercapai 75 persen. Hal ini menandakan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai sasaran utama dinas telah tercapai bahkan ada yang melebihi target.

### 2.3. Rencana Kerja Tahun 2019

#### 2.3.1. Program

Bahwa yang menjadi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM;
2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UKM;
3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM;
4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif.

Atas dasar kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka yang menjadi program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM
7. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/ Revitalisasi Kelembagaan
9. Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
10. Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan.

#### 2.3.2. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2018, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 316.418.979,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 466.930.000,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 25.740.000,-
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 5.000.000,-
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 19.080.000,-

7. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 24.935.000,-
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 80.000.000,-
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
10. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 70.000.000,-
11. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 7.752.000,-
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 33.615.612,-
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 160.084.000,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 18.875.000,-
15. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 115.330.000,-
16. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 7.031.036,-
17. Penyusunan Renstra, dengan biaya Rp. 9.942.679,-
18. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 41.642.000,-
19. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 25.599.974,-
20. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
21. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 81.002.874,-
22. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM, dengan biaya Rp. 123.982.500,-
23. Sosialisasi KUMK 15 kab/kota, dengan biaya Rp. 141.288.000,-
24. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan biaya Rp. 300.000.000,-
25. Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 75.851.200

26. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 72.239.784,-
27. Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan, dengan biaya Rp. 22.752.750,-
28. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
29. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan, dengan biaya Rp. 46.814.556,-
30. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya Rp. 44.033.320,-
31. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 547.052.000,-
32. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 37.022.126,-
33. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 63.105.200,-
34. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, dengan biaya Rp. 34.072.880,-
35. Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita, dengan biaya Rp. 95.000.000,-
36. Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan, dengan biaya Rp. 29.873.796,-
37. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.921.420.000,-
38. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya Rp. 156.728.135,-
39. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 102.318.500,-
40. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
41. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 16.068.316,-



42. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 39.121.795,-
43. Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
44. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 60.133.988,-

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	100 %	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	%	100	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Jumlah Koperasi Aktif yang melaporkan Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan	%	100	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Meningkatkan dan Berkembang Usaha serta Kelembagaannya	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi	Koperasi	15	102,318,500
													Meningkatnya Ketersediaan Data Keragaan Koperasi	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi	Kab/Kota	15	75,000,000
													Meningkatnya Jumlah Koordinasi Koperasi	Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	Koperasi	125	39,121,795
														Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	Jumlah Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	Koperasi	50	75,000,000
													Meningkatnya SDM Koperasi dan UMKM	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Kab/Kota	15	16,068,316

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	%	100	Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif	Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikaan dan perkulakan	Jumlah koperasi yang mendapat akses kemitraan dengan perusahaan pabrikaan dan perkulakan	Koperasi	15	46,814,556
														Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	jumlah fasilitasi pembentukan perusahaan jaminan kredit daerah bagi koperasi dan UMKM	PT	1	44,033,320
								Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM	Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Peran Koperasi dan UKM	%	100	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang mendapat akses kredit ke Perbankan	Peningkatan jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yang jenis usahanya meningkat	Koperasi	15	63,105,200
														Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses kredit ke perbankan, lembaga non bank baik pusat maupun daerah	Koperasi	10	34,072,880
								Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	%	100	Jumlah Koperasi yang mendapat akses bantuan Permodalan dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Baik Pusat maupun Daerah	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	Jumlah SDM koperasi yang dibina untuk menguasai standar akuntansi koperasi	Orang	30	29,873,796

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi	Jumlah anggota koperasi yang di evaluasi	Orang	210	156,728,135
													Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Orang	495	#####
								Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan UKM	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	Jumlah Kredit yang disalurkan	Milyar	4.5	Meningkatnya Pelayanan UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UKM	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Bulan	12	547,052,000
													Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	Jumlah Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	KUMKM	180	37,022,126	
								Peningkatan kesadaran Koperasi dan UKM terhadap peraturan dan kebijakan Perkoperasian dan kesehatan Lembaga Koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Kelembagaan, Usaha dan Pembiayaan Koperasi	Koperasi	80	Meningkatnya Pengawasan terhadap Penerapan Aturan Perkoperasian dan Kesehatan Lembaga Koperasi	Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	50	100,000,000
													Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Koperasi	30	22,752,750	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													Meningkatnya Upaya Penilaian Kesehatan Koperasi	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi	30	81,002,874
	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	100 %	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	100	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	UKM	100	Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	Jumlah Temu konsultasi pemberdayaan usaha UKM	Kali	2	123,982,500
													Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	Jumlah sosialisasi KUMK di kab/kota	Kab/Kota	15	141,288,000
								Peningkatan Kinerja Layanan dan Akses Pemasaran KUMKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Kinerja Pelayanan PLUT	%	100	Meningkatnya kinerja layanan terpadu PLUT bagi KUMKM	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah peserta pendampingan PLUT dalam bidang produksi, pemasaran dan pembiayaan	KUMKM	100	75,851,200
													Meningkatnya kualitas SDM KUMKM dan Pemantapan kelembagaan KUMKM	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Jumlah pengembangan PLUT dalam bidang kelembagaan, SDM, dan kewirausahaan	KUMKM	120	72,239,784
								Peningkatan Tatakelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM	persentase Pengelolaan Koepembagaan Koperasi dan UMKM	%	100	Meningkatnya Wirausaha Baru	Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita	Jumlah peserta diklat	Orang	35	95,000,000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Pelaku Usaha yang Bernilai Tambah dari Aspek Sertifikasi, HaKI, dan Paten	%	100	terlindungi produk UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Produk UKM	%	100	Meningkatnya Jaringan Usaha dan Pemasaran	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah pameran dan promosi produk-produk unggulan daerah	Kali	5	300,000,000
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>																		
								Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tertib Adminitrasi Perkantoran	%	100	Tersedianya Kebutuhan Kantor	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	316,418,979
														Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	120,000,000
														Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	25,740,000
														Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	5,000,000
														Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembiayaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	19,080,000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN	
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
															Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah pembiayaan penyediaan makan dan minum rapat	Bulan	12	24,935,000
															Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	10	80,000,000
															Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	18	60,000,000
															Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan	Even	1	70,000,000
															Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	4	5,752,000
								Meningkatnya Barang Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kebutuhan Barang Kantor	%	100	Tertib Administrasi Barang Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	1	33,615,612	
															Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	160,084,000
															Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12	18,875,000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kinerja Aparatur	%	100	Peningkatan Kinerja Aparatur	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai	Bulan	12	115,330,000
														Penyusunan data kepegawaian	Jumlah penyusunan data kepegawaian	Bulan	12	41,642,000
								Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	%	100	Meningkatnya capaian kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	466,930,000
														Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Bulan	12	7,031,036
								Optimalnya Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas	Grid	BB	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan	Penyusunan Renstra -	Jumlah penyusunan dokumen Renstra	Bulan	12	9,942,679
														Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja	Dokumen	11	25,599,974
														Monev dan sinkronisasi program	Jumlah Monev dan sinkronisasi program	Kali	15	50,000,000



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM					KEGIATAN					PAGU ANGGARAN
				Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Sasaran Program	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Target	Sasaran Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Sinkronisasi Program Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota	perencanaan pembangunan daerah Tahunan	Persentase Capaian Program/ Kegiatan Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota	%	100		Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang OPD	Orang	70	60,133,988



















## **BAB III PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar **100%**.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2019.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## 2.3. Matrik Renstra 2015 - 2019

## Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan Bidang	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	<b>11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>										
2	<b>11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>										
2	11 15 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal permodalan Bagi KUMKM	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 3 Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11 15 5 Rakor dengan Dinas/Instansi terkait tentang fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 6 Bintek dan transplantasi bagi Pengelola Koperasi Pola Konvensional dan syariah	0		100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11 15 7 Rakor Validasi/Pemutakhiran Data KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 8 Workshop Evaluasi Penyaluran Dana Bergulir	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 9 Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan	100.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 10 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	105.000.000	2 Angkatan	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan
2	11 15 11 Rakor Fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit daerah	110.000.000	4 Kali	0		0		0		0	
2	11 15 12 Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi pengelola koperasi pondok pesantren	100.000.000	15 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	270.000.000	20 Orang
2	11 15 13 Rakor Pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	125.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota
2	11 15 14 Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11 15 15 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11 15 16 Tranplantasi Dalam Rangka Pembentukan PPKD Provinsi Lampung	80.000.000	1 Kali	0		0		0		0	
2	11 15 17 Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU	0		100.000.000	15 Orang	110.000.000	15 Orang	120.000.000	15 Orang	135.000.000	15 Orang
2	11 15 18 Bimtek menggali potensi ide bisnis	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11 15 19 Rakor program penilaian kesehatan dan pengawasan KSP/USP	0		200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali
2	11 15 20 Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0		50.000.000	50 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi
2	11 15 21 Bimbingan teknis penyusunan proposal pengembangan usaha bagi KSP/USP	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 22 Rakor penyusunan program pembinaan KSP/USP yang sehat mandiri dan berkembang	0		200.000.000	20 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket
2	11 15 23 Rakor dengan dinas /instansi/pemangku kepentingan tentang peluang permodalan bagi KSP/USP	0		150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi

2	11	15	24	Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSP/USP, KJKS/UJKS	0		100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11	15	25	Pendampingan pameran KUMKM dalam negeri dan luar negeri	0		900.000.000	8 Keg	800.000.000	8 Keg	900.000.000	8 Keg	700.000.000	8 Keg
2	11	15	26	Rapat koordinasi provinsi dengan pusat	0		240.000.000	3 Keg	240.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg
2	11	15	27	Pendataan dan pembinaan KUMKN	0		70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
2	11	15	28	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	0		70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11	15	29	Temu konsultasi dinas koperasi/UMKM se Provinsi Lampung	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg
2	11	15	30	Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	0		180.000.000	2 Keg	190.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg
2	11	15	31	Workshop evaluasi penyaluran dana bergulir	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	15	33	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	0		300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi
2	11	15	34	Promosi produk-produk unggulan di anjungan TMII	0		150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg
2	11	15	35	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	0		200.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	36	Bimtek manajemen usaha koperasi pengelolaan sistem resi gudang (SRG)	0		150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg
2	11	15	37	Bimtek manajemen usaha pedagang kaki lima (PKL)	0		100.000.000	1 Keg	110.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	38	Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	0		90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	39	Bimtek peningkatan jaringan usaha dan pemasaran bagi KUMKM berbasis produk unggulan daerah	0		100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	40	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi pariwisata	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	95.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg
2	11	15	41	Transplantasi luar daerah provinsi lampung tentang pengelolaan pariwisata oleh koperasi	0		120.000.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11	15	42	Workshop temu usaha UKM Center	0		30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg
2	11	15	43	Pembinaan UKM di UKM Center	0		1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg
2	11	15	44	Bimtek anggota koperasi yang menghasilkan produk yang berdaya saing dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
2	11	15	45	Bimtek bagi pengurus koperasi pengelola pasar tradisional	0		250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg
2	11	15	46	Transplantasi bagi pengurus koperasi pasar tradisional ke luar provinsi	0		300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg
2	11	15	47	Pembinaan KUMKM dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg
2	11	15	48	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	0		0		100.000.000	10 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM</b>										
2	11	16	1	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	600.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%
2	11	16	4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	205.000.000	160 KUMKM	250.000.000	175 KUMKM	275.000.000	180 KUMKM	325.000.000	200 KUMKM	375.000.000	220 KUMKM
2	11	16	5	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	130.000.000	80 KUMKM	150.000.000	80 KUMKM	200.000.000	90 KUMKM	250.000.000	100 KUMKM	300.000.000	110 KUMKM
2	11	16	6	Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	120.000.000	60 KUMKM	150.000.000	70 KUMKM	200.000.000	70 KUMKM	250.000.000	80 KUMKM	325.000.000	90 KUMKM
2	11	16	7	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	70.000.000	70 KUMKM	100.000.000	85 KUMKM	175.000.000	100 KUMKM	225.000.000	140 KUMKM	300.000.000	170 KUMKM

2	11	17		<b>Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM</b>										
2	11	17	1	Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KUMKM	0	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	
2	11	17	4	Bimtek dan Transplantasi bagi Pengelola KUMKM	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	17	8	Bimtek pengembangan usaha simpan pinjam pola konvensional dan pola syariah	0	170.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	200.000.000	4 Angkatan	
2	11	17	9	Pembinaan LKM / BMT penerima bantuan modal kerja	0	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	
2	11	17	10	Pembinaan KSP / USP penerima dana bergulir MAP, PKPS-BBM, agribisnis/ sektoral P3KUM pola konvensional dan P3KUM pola syariah	0	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	
2	11	17	11	Rakor antara KSP/USP dengan lembaga keuangan	0	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	
2	11	18		<b>Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM</b>										
2	11	18	1	Diklat Strategi Pemasaran Bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	70.000.000	30 Orang	0	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	18	2	Diklat Studi Kelayakan Usaha bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	0	0	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	18	3	Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	0	75.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	
2	11	18	4	Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	0	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	18	5	Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM	0	50.000.000	25 Orang	0	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	30 Orang	
2	11	18	6	Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita	0	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0	0	0	0	
2	11	18	7	Pembinaan kelembagaan usaha dan administrasi bagi KSP/USP	0	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	
2	11	18	8	Bimtek manajemen pengembangan usaha dan kemitraan bagi koperasi dan jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	18	9	Diklat manajemen koperasi bagi pengelola koperasi wanita	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0	
2	11	19		<b>Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM</b>										
2	11	19	6	Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha pemula	0	160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang	
2	11	19	7	Bimtek penilaian kesehatan bagi pejabat	0	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	
2	11	19	8	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola konvensional	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	9	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	10	Diklat koperasi jasa keuangan bagi kasir berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	11	Bimtek perpajakan bagi pengelola koperasi	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	12	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	13	Diklat pengawasan dan pembinaan koperasi bagi tenaga pengawas dan Pembina	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	
2	11	19	14	Bimtek sistem tanggung renteng bagi kopwan	0	200.000.000	100 Orang	0	0	0	0	0	0	
2	11	19	15	Bimtek vokasional bagi anggota kopwan	0	100.000.000	75 Orang	0	0	0	0	0	0	
2	11	19	16	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2	11	20		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan</b>										
2	11	20	9	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparat	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	10	Sosialisasi program tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi SMK/SMU dan Pondok Pesantren	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	11	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	0		150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang
2	11	20	12	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang
2	11	20	13	Penyusunan program pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		150.000.000	100 Koperasi	175.000.000	125 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi
2	11	20	14	Penyebarluasan peraturan / perundangan di bidang pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP / USP	0		100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket
2	11	20	15	Tranplantasi manajemen bagi pengurus KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0		325.000.000	4 Angkatan	350.000.000	4 Angkatan	320.000.000	4 Angkatan	400.000.000	4 Angkatan
2	11	20	16	Pencetakan juknis peluang permodalan bagi KSP/USP	0		160.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku
2	11	20	17	Identifikasi KSP/USP calon penerima program pembiayaan dari LPDB dan lembaga lainnya	0		75.000.000	150 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi
2	11	20	18	Verifikasi terhadap KSP/USP calon penerima program pembiayaan	0		150.000.000	150 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi
2	11	21		<b>Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>										
2	11	21	1	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	200.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	2	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	100.000.000	15 kab/kota	650.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	3	Workshop Revitalisasi Koperasi	80.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	120.000.000	100 Koperasi
2	11	21	4	Peningkatan Pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi	100.000.000	100 KUMKM	0		0		0		0	
2	11	21	5	Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif	150.000.000	15 kab/kota	165.000.000	15 kab/kota	180.000.000	15 kab/kota	198.000.000	15 kab/kota	217.800.000	15 kab/kota
2	11	21	6	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan kewirausahaan melalui pembentukan UKM Center	120.000.000	30 Orang	0		0		135.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang
2	11	21	7	Pemeringkatan Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	110.000.000	60 Koperasi	121.000.000	60 Koperasi	133.100.000	60 Koperasi	146.410.000	60 Koperasi
2	11	21	8	Diklat membuat Website dan Internet Marketing bagi KUMKM	89.867.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	9	Pelatihan Akuntansi Komputer bagi koperasi usaha Ritel	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	10	Diklat Ketrampilan menjahit bagi Koppontren	80.000.000	32 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	11	Bimtek Peningkatan kelembagaan bagi Koperasi tidak akif	150.000.000	60 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	12	Diklat Kewirausahaan Bidang Boga bagi Ibu RT dan Remaja Putus sekolah	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	13	Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung	110.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	14	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	134.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota

2	11	21	15	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima Bansos	70.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	21	16	Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM	80.000.000	30 Orang	0		90.000.000	30 Orang	0		110.000.000	30 Orang
2	11	21	17	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan Koperasi simpan pinjam	130.000.000	60 Orang	0		140.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang
2	11	21	18	Pengembangan SDM bagi Pembina dan Koperasi Simpan Pinjam	150.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang	160.000.000	60 Orang	170.000.000	60 Orang
2	11	21	19	Diklat pemasaran hasil usaha	0		0		70.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	20	Diklat manajemen bisnis ritel	0		70.000.000	30 Orang	0		0		0	
2	11	21	21	Diklat akuntansi usaha bisnis ritel	0		0		70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	22	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0		75.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang
2	11	21	23	Diklat manajemen jasa keuangan syariah	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	24	Diklat manajemen simpan pinjam terapan bagi pengelola koperasi	0		0		0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	25	Diklat manajemen usaha simpan pinjam konvensional	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	26	Pelatihan kewirausahaan bagi wanita dan anak wilayah pesisir	0		75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	27	Pemberdayaan kelompok usaha pemula	0		80.000.000	2 KUMKM	80.000.000	2 KUMKM	85.000.000	2 KUMKM	90.000.000	2 KUMKM
2	11	21	28	Diklat kewirausahaan bagi koperasi baru	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	29	Diklat perkoperasian bagi anggota koperasi	0		65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	30	Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	31	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0		75.000.000	30 Orang	0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	32	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	33	Diklat perpajakan bagi koperasi	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	35	Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi	0		0		0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	36	Diklat studi kelayakan usaha bagi pengelola koperasi dan UMKM	0		0		65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	37	Diklat analisa pinjaman / pembiayaan usaha bagi pengelola koperasi	0		0		0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	38	Diklat akuntansi dasar usaha kecil dan menengah bagi pengelola koperasi	0		75.000.000	30 Orang	0		0		0	
2	11	21	39	Diklat akuntansi simpan pinjam dasar pola konvensional	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	40	Diklat akuntansi simpan pinjam lanjutan pola konvensional	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	41	Diklat akuntansi jasa keuangan syariah	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	42	Diklat analisa laporan keuangan simpan pinjam pola konvensional	0		0		70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	43	Diklat audit laporan keuangan	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	44	Diklat pengelola KSP/USP koperasi berbasis kompetensi pola konvensional	0		70.000.000	30 Orang	0		0		0	
2	11	21	45	Diklat perkoperasian bagi pamong desa	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	46	Diklat peningkatan keterampilan aplikasi akuntansi koperasi	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	47	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	0		200.000.000	80 Orang	220.000.000	80 Orang	240.000.000	80 Orang	270.000.000	80 Orang



2	11	21	48	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	0		0		100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi
2	11	21	49	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	0		0		100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang
<b>4</b>				<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>4</b>	<b>5</b>			<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>										
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
4	5	19	1	Pendidikan dan pelatihan formal	0		60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan
<b>5</b>				<b>URUSAN PENDUKUNG</b>										
<b>5</b>	<b>4</b>			<b>Non Urusan (Eks BAU)</b>										
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
5	4	15	1	Penyediaan jasa surat menyurat	28.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan
5	4	15	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan
5	4	15	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	212.400.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	315.000.000	12 Bulan
5	4	15	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.443.600	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan
5	4	15	10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan
5	4	15	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	15	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.054.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan
5	4	15	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0		0		0		0		0	
5	4	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan
5	4	15	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan
5	4	15	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	148.907.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	15	22	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	68.004.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan
5	4	15	29	Pameran dan Promosi Pembangunan	53.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
5	4	16	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0		0		0		300.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket
5	4	16	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket
5	4	16	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0		0		0		0		0	
5	4	16	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0		200.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan
5	4	16	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	143.253.400	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
5	4	17	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99.325.000	3 Paket	115.000.000	3 Paket	120.000.000	3 Paket	135.000.000	3 Paket	155.000.000	3 Paket
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
5	4	19	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	19	26	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan
5	4	19	27	Musrenbang Tahun 2015	72.929.000	1 Dokumen	0		0		0		0	
5	4	19	28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0		60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen
5	4	19	30	Kerjasama Anggota MPU	0		75.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg
5	4	19	37	Kajian Pengembangan UMKM Melalui pengembangan Produk Unggulan Agribisnis	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	0		0		0	

5	4	19	39	Rapat Teknis anggota MPU Sektor Koperasi	89.000.000	1 Keg	0		0		0		0	
5	4	19	40	Kerja sama Anggota MPU Sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan sektor Industri	50.000.000	1 Keg	0		0	0	0	0	0	0
5	4	19	43	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri	50.000.000	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	19	128	Peningkatan jasmani dan rohani aparatur	0		20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	19	129	Evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan UMKM	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	19	130	Pameran dan promosi produk anggota-anggota Mitra Praja Utama (MPU)	0		0		50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
5	4	20	1	Penyusunan laporan Keuangan	27.800.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan
5	4	20	3	Penyusunan Laporan Bulanan	10.715.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	20	6	Penyusunan Renstra -	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	20	22	Penyusunan data kepegawaian	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	20	35	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	76.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan
5	4	20	69	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	64.285.000	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	80.000.000	7 Dokumen	90.000.000	7 Dokumen	110.000.000	7 Dokumen
5	4	20	77	Peningkatan Data dan Informasi	70.017.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>25</b>		<b>Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan</b>										
5	4	25	25	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	0		85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen
<b>TOTAL</b>					<b>6.080.000.000</b>		<b>19.305.000.000</b>		<b>20.551.000.000</b>		<b>21.186.100.000</b>		<b>22.669.210.000</b>	